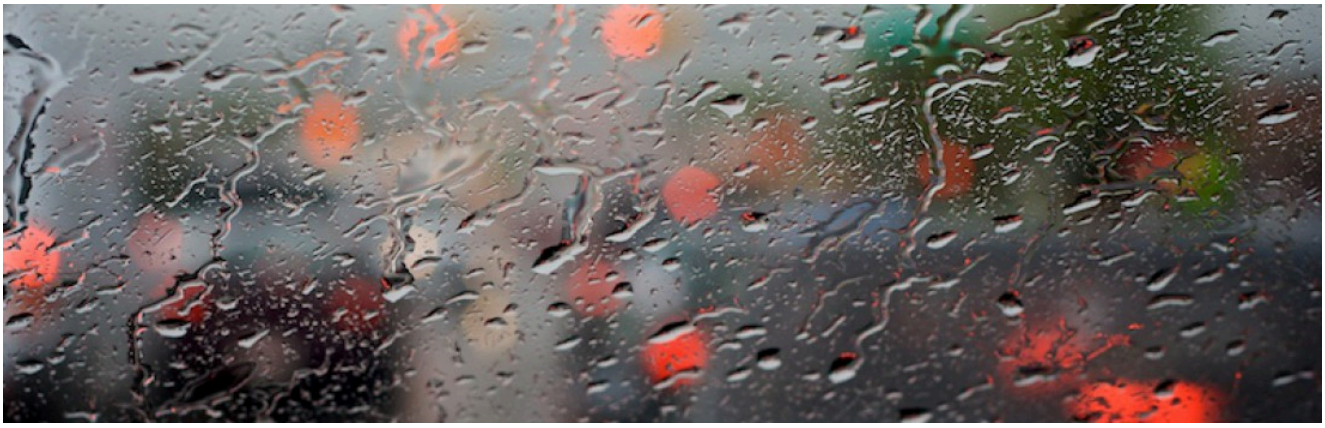

Rekuperasi Woke (Bag. II): Cancel Culture dan Panoptikon

April 30, 2023 by kinky ninja | 3 Comments

> *Cancel culture is not actually about justice. It is about control. People use cancellation to force conformity to ideals.*
>
> —TEAL SWAN

PADA MASA KEJAYAAN TOTALITARIANISME Uni Soviet, Joseph Stalin mengisi kamp-kamp kerja paksanya, yang biasa disebut gulag, tidak lagi dengan mereka yang hendak mengembalikan kejayaan Tsar, melainkan dengan siapapun yang disinyalir bersuara sumbang. Pada masa tersebut, penduduk Soviet didorong untuk melaporkan semua tindak antirevolusioner yang muncul di antara sesama pekerja, tetangga, kolega partai, bahkan anggota keluarga, dan teman, walau sekecil lontaran guyonan yang mempertanyakan kekuasaan partai.

MEMORIES

- Tentang Homofobia
- Pasca Agustus ’25
- Singapura, Juni 2026: Tangerine
- Gregorius Hugo
- À l’éloge des femmes plus âgées
- Manusiawi, Teramat Manusiawi
- Anarkis #12: Tentang Alfredo Bonnano
- Paradoks Kesempurnaan Sistem
- Kisah Singkat Soal Pengkhianatan
- Tentang Penderitaan

TIME

April 2023

M	T	W	T	F	S	S
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Universitas Chicago, 1994, mengenai praktek-praktek penuduhan yang berakibat pada penghilangan pada masa kekuasaan Stalin, Popovian, seorang lelaki yang menjadi anggota partai sejak 1918, dihilangkan akibat laporan yang dilayangkan oleh rekan kerjanya sessama ahli kimia di sebuah rumah sakit Spitzher, M.P. Gribanova, pada 1937. Surat tersebut menyatakan bahwa Gribanova ingat bagaimana ia melihat bahwa Popovian bersama istrinya ia temui sedang bercakap-cakap dengan seorang berkebangsaan Norwegia pada pukul 8 pagi di sebuah ruangan tertutup.

> *The conversation was conducted rather quietly, in English and sometimes in German. Before [the Norwegian] left, Popovian gave him a package and added something in German, but I don't know what it was.*

Beberapa hari kemudian Popovian lenyap dan tak seorang pun tahu jejaknya. Mungkin ada beberapa yang tahu namun memilih untuk tutup mulut.

Dan kasus itu bukan sebuah kasus tunggal. Atmosfir saling curiga kala tersebut amat tinggi, bahkan di antara saudara sendiri. Seseorang tak pernah tahu atas apa dan siapa yang akan melaporkan dan menuduhnya kontrarevolusi yang seringkali berujung pada penahanan tanpa pengadilan—atau penghilangan. Termasuk hanya berdasar kecurigaan belaka yang tak pernah terbukti atau ada upaya pembuktian sama sekali. Bahkan sang pelapor sendiri seringkali tak diberi tahu perkembangan kasus yang ia lapor dan tuduhkan, selain kesadaran bahwa ia yang dilaporkan seakan menyublim secara instan. Hilang begitu saja.

*****

Pascakasus 27 Juli 1996 atau yang biasa disebut tragedi Kudatuli, aku ingat di satu malam berbincang dengan orangtuaku saat menonton televisi. Kala tersebut adalah satu tahun menjelang Pemilu, sehingga pembicaraan mengenai Pemilu cukup kencang dibandingkan sebelum-sebelumnya, terutama karena tragedi tersebut menyeret PDI, yang

« Mar Jun »

RECENT RESPONSES

- kinky ninja on Gregorius Hugo
- Penyuka yuka honjo on Gregorius Hugo
- kinky ninja on Anarkis #12: Tentang Alfredo Bonnano
- kinky ninja on Manusiawi, Teramat Manusiawi
- Library Assistant on Manusiawi, Teramat Manusiawi
- rex tukangtidur on Anarkis #12: Tentang Alfredo Bonnano
- kinky ninja on Kisah Singkat Soal Pengkhianatan
- kinky ninja on Tentang Penderitaan
- kinky ninja on Kisah Singkat Soal Pengkhianatan
- kinky ninja on Tentang Penderitaan

FOLLOW MEMORIES VIA EMAIL

Enter your email address to follow this journey back home and receive notifications of new posts by email.

Email Address

Sign me up!

menjadi salah satu partai peserta Pemilu, saingan Golkar—partai utamanya pemerintah Orde Baru. Dan itu adalah kali kedua aku memiliki hak coblos—sebelumnya aku mencoblos ketiga partai yang saling bersaing karena aku tak peduli dan tak mau tahu sama sekali soal politik, bukan karena kesadaran bahwa aku tak mau memberikan suaraku.

Aku ingat bagaimana sambil menonton berita, yang menyatakan bahwa kasus Kudatuli tersebut ditunggangi komunis, aku bertanya pada ayahku, seorang pegawai negeri sipil, apakah ia tak pernah sama sekali terpikirkan untuk mencoba mencoblos partai lain selain Golkar.

Kala tersebut aku telah mulai terpolitisir akibat kebiasaan senior-seniorku kala aku masih kuliah dulu, yang sering datang dan nongkrong di studio kerja kampus dan berbincang mengenai kasus-kasus penggusuran yang disenyapkan oleh militer seperti kasus Kedung Ombo, 1989. Aku tak pernah berkomentar, hanya saja sambil bekerja aku tak mungkin tak mendengar perbincangan mereka. Aku jadi membaca selebaran-selebaran gelap yang mereka buat juga, karena hanya di studio kampusku ini tersedia mesin cetak offset yang dapat digunakan oleh para mahasiswanya—dan studio dibuka selama 24/7. Aku membaca kasus Sum Kuning juga akibat stensilan berisi kronologi kasusnya tergeletak begitu saja di meja studio. Dan beberapa tahun kemudian aku menjadi paham mengapa fakultasku tersebut menggunakan logo bintang berwarna merah sebagai logo fakultasnya.

Beberapa tahun sebelumnya juga, dengan mata kepalaku sendiri, saat secara tak sengaja aku terjebak di kerumunan di alun-alun Bandung kala terjadi demonstrasi para tukang becak, aku melihat bagaimana para tukang becak tersebut dipukuli dengan brutal oleh jajaran kepolisian dan tentara. *Di depan mataku sendiri*. Mereka tak bersenjata sama sekali. Mereka tidak memprovokasi apapun atau siapapun. Mereka hanya meminta agar suara mereka didengarkan, suara bahwa mereka meminta agar pemerintah tidak begitu saja melarang becak beroperasi tanpa mengajukan solusi sama sekali. Dan mereka dipukuli dengan begitu garang. Hanya karena mereka bertanya.

Maka kala menonton televisi dan mendapat informasi mengenai komunis menunggangi kasus Kudatuli, aku mempertanyakan soal Golkar. Sekadar ingin tahu.

Aku juga ingat bahwa ayahku sama sekali tak menjawab pertanyaanku. Sama sekali tak bergeming. Sementara ibuku berkata padaku, jangan

STORAGE

Select Month

STRONGEST MEMORIES

Tentang Homofobia

[NSFW] Kisah-Kisah Melenceng yang Kupersembahkan bagi para Imoral

Pasca Agustus '25

Anarkis #12: Tentang Alfredo Bonnano

Manusia Sebagai Pusat Alam Semesta

Gregorius Hugo

Tentang Manusia dan Kemanusiaan

Singapura, Juni 2026: Tangerine

Tentang Penderitaan

Rekuperasi Woke (Bag. II): Cancel Culture dan Panoptikon

pernah mengajukan pertanyaan seperti itu dan jangan sampai siapapun tahu bahwa aku pernah mempertanyakan soal seperti itu.

Jangan sampai siapapun tahu.

*****

Berbarengan dengan hadirnya istilah SJW, *social justice warrior*, dalam satu dekade belakangan ini. Bareng juga dengan naiknya popularitas penggunaan media sosial, terutama Twitter, kita mulai mengenal istilah *call-out* dan *cancel culture.* Walau mirip, keduanya berbeda, *call-out* upaya untuk menarik perhatian dengan tujuan mempermalukan atau membongkar kedok seseorang yang menjadi sasaran atas kesalahan atau kejahatannya. Sementara *cancel culture* merujuk pada aksi untuk melenyapkan eksistensi seseorang dalam platform digital, namun juga lebih luas pada seluruh aspek kehidupannya. Ini bukan lagi sekadar aksi boikot, namun benar-benar melenyapkan seseorang tersebut dari eksistensinya.

Walau *cancel culture* dapat saja dianggap radikal pada tingkatnya sendiri, cenderung tidak menggunakan struktur kekuasaan formal seperti badan peradilan, dan dalam beberapa sisi bisa dianggap lebih demokratis karena mengandalkan keputusan suara terbanyak dari opini publik. Hanya ironisnya, saat ia tidak memanfaatkan struktur formal negara, ia justru membuat sebuah garis paralel antara dirinya dengan sistem totalitarian yang banyak digunakan oleh pemerintah-pemerintah totaliter di mana-mana: penggunaan sistem disiplin dan hukuman.

Tentu saja, saat berbicara mengenai disiplin dan hukuman, aku jadi merujuk pada satu filsuf yang menyelami secara mendalam topik tersebut, Michel Foucault. Hukuman itu bermetamorfosis, bertransformasi, terutama sejak abad ke-18, tentu saja. Penghukuman di hadapan publik, yang menjadi tontonan massal, *spectacle*, seperti guillotine atau penyiksaan tak lagi dianggap sebagai sesuatu yang baik —dengan pengecualian seperti yang dilakukan oleh Taliban, yang pada awal kekuasaannya di Afghanistan menjadikan stadion olahraga menjadi arena penghakiman dan penghukuman yang harus dihadiri oleh publik, atau juga penghukuman cambuk di Aceh yang juga dilakukan di hadapan publik. Penghukuman telah mentransformasikan

pengalaman jasmaniah ke dalam sebentuk pendisiplinan melalui sistem penjara. Tontonan publik yang tersisa hanyalah penghakimannya saja, tidak penghukumannya. Penderitaan yang monumental juga telah digantikan oleh penghapusan kebebasan personal. Memasuki era media sosial, di mana kekuasaan negara dianggap tak mampu lagi memberikan penghukuman—terutama juga karena tak adanya lagi penghukuman di depan publik—yang seringkali berujung pada lepasnya sang terhukum dari keharusan menjalani hukuman, publik seakan didorong untuk membentuk penghukumannya sendiri yang tak memerlukan lagi campurtangan hukum formal.

Walau tidak dioperasikan oleh negara—kalau pun ada, setidaknya tidak secara terbuka—*cancel culture* memiliki dampak dan memberikan tekanan yang besar pada siapapun yang dianggap tidak sejalan. Kalau pada masa-masa lampau ia yang dianggap bersalah dipermalukan di hadapan publik, kini ranahnya saja yang berubah, ia yang tertuduh dipermalukan di media sosial. Dan melalui media sosial pula hukuman dijalankan. Pengasingan sudah pasti, belum lagi siapa pun yang masih berhubungan dengan sang tertuduh akan dilabeli juga sebagai musuh, antek-antek sang tertuduh, yang layak diserang sebagaimana sang tertuduh diserang. Tempat sang tertuduh bekerja akan dipaksa untuk menutup pintunya, lingkaran perkawanannya dipaksa untuk meninggalkannya, kalau bisa warteg pun akan dipaksa untuk tak melayaninya kalau ia kelaparan. Bahkan tak jarang keluarga sang tertuduh juga dipaksa untuk menghukum anggota keluarganya sendiri tersebut. Pendeknya, ia tak boleh bersosialisasi, tak boleh berkomunikasi, tak boleh melakukan apapun, tak boleh makan, bahkan kalau saja bumi dapat dikendalikan, maka bumi akan dilarang memberikan oksigen pada sang tertuduh. *Ia dipaksa untuk mati*. Di hadapan publik. Siapapun yang menentang akan mendapat teriakan histeris dari publik yang bertingkah seperti para penonton pertandingan gladiator yang haus darah. Yang tak terpuaskan sebelum sang gladiator terbunuh atau membunuh.

Dan kita juga tentu tahu bahwa arena gladiator seringkali digunakan sebagai arena pembantaian, penghukuman, bagi mereka yang dianggap melawan nilai-nilai publik dan kekuasaan dominan. Tak jarang mereka yang berada di tengah lapangan dan diumpankan kepada singa atau kepada para gladiator untuk dibunuhi begitu saja adalah mereka para pemberontak dan yang bersuara sumbang. Mereka yang tak sejalan dengan pandangan umum.

Entah itu arena gladiator, guillotine, pengarakan pelaku zina, perajaman, semua memiliki pola yang sama, bahwa siapapun yang tak sejalan dengan publik telah memberikan alasan kuat untuk kita eksploitasi untuk dapat diperlakukan sesuka kita.

Sedari tadi aku menggunakan istilah tertuduh, karena seringkali mereka yang dituduh bersalah dihukum tanpa memiliki kesempatan untuk membela diri atau mengemukakan alasannya sendiri. Tak ada hakim dalam permainan ini, selain suara dominan dari publik, apalagi dengan adanya kampanye para feminis dua puluh tahun lampau, "berpihak pada korban" yang awalnya dikampanyekan sebagai bagian dari upaya mereka mengakomodir suara para korban pelecehan dan perkosaan, direkuperasi oleh kepentingan dominan untuk memuaskan hasrat haus darah para penonton di arena gladiator.

Lagipula, kalau suara dominan dianggap sebagai patokan kebenaran, maka seharusnya Nazi benar, karena toh partai Nazi naik ke tampuk kekuasaan melalui pemberian suara terbanyak dari rakyat Jerman; tindakan sewenang-wenang IDF dan kebijakan perdana menteri Israel juga benar karena suara mayoritas penduduk yahudi Israel memilih untuk mengenyahkan eksistensi Palestina yang mereka konotasikan sebagai teroris atau antek teroris. Perhatikan juga kasus di mana pada masanya Galileo Galilei dihukum karena ia membenarkan Copernicus yang nyatakan bahwa bumi berputar mengelilingi matahari—sesuatu yang melawan keyakinan publik umum kala tersebut. Karenanya tidak, bagiku tidak, suara dominan bukan jaminan bagi sebuah kebenaran. Apalagi kalau para praktisinya bertindak hanya demi hasrat untuk menumpahkan darah, bukan lagi demi memberikan keadilan dan membuka kebenaran. Dan kita semua tahu, bahwa para praktisi *cancel culture* diisi oleh karakter-karakter tak berwajah dari jenis para penonton gladiator.

Dan kita juga seharusnya sadar, bahwa sebenci-bencinya aku dengan bagaimana sistem formal dijalankan, *cancel culture* jauh lebih brutal dibanding pengasingan melalui penjara dari penghukuman formal, di mana penghukuman formal masih memiliki tenggat waktu masa hukuman, sementara *cancel culture* sama sekali tidak. Tak ada batas waktu yang ditetapkan. Lama penghukuman ditentukan sesuka hati oleh para praktisinya.

Bayangkan, seseorang dituduh bersalah tanpa memiliki kesempatan membela diri, tak seorang pun mempertanyakan siapa sang pelapor atau penuduh, dilucuti segala eksistensinya termasuk eksistensinya di

dunia nonvirtual, dalam masa waktu yang tak ditentukan. Foucault benar. Panoptikon, oh, panoptikon.

Perilaku para praktisinya hanya membenarkan teori bahwa ada darah pembunuh mengalir dalam diri kita—yang tak terpuaskan kalau kita tidak menyiksa sesuatu atau seseorang, dan melihatnya mati perlahan-lahan, baik secara harfiah atau tidak.

Categories: Here and Now, Reflections | Permalink.

Author: kinky ninja

I am only human. Lived in Jakarta but somehow left parts of my heart somewhere else. This blog is about getting on with things as they are. The disasters are all about continuity, about finding ways of enduring in the face of hopelessness; what we do deals in the need to find ways of telling truth in a postmodern world of rumbling emotional chaos. My writings are about both; about bearing the unbearable and giving a true account of it. This is my memories, this is my journey to fade into nothingness.

3 THOUGHTS ON "REKUPERASI WOKE (BAG. II): CANCEL CULTURE DAN PANOPTIKON"

Leave a comment

Persetan Dunia
May 1, 2023 at 8:19 pm

Ada batas waktu dari cancel culture, yaitu tergantung dari kasus yg lagi hype kedepannya yang bisa bikin para netizen ini melupakan kasus sebelumnya.

Khusus di indonesia, dimana ga semua orang main twitter dan pas ketemu cenderung lebuh sopan daripada di internet, korban cancel kultur masih bisa lah makan di warteg

★

Like Reply

kinky ninja
May 2, 2023 at 5:00 am

Untuk paragraf kedua ya jelas, mendorong bumi untuk tidak ngasih oksigen kan juga jelas gak bisa. Tapi kan itu yang diinginkan warganet kalau saja bisa. Itu kan apa yang disebut dalam bahasa Inggris sebagai figuratively speaking. Tapi poin bahwa warganet hanya galak di depan layar tapi nunduk-nunduk sopan kalau ketemu betulan, itu betul banget sih.

★ Liked by 1 person

Reply

dead omèrta
June 17, 2023 at 8:19 pm

Aku pribadi enggak setuju cancel culture diberlakukan untuk semua kasus. Toh, belakangan juga dipakai sekadar untuk menyerang orang yang tidak sejalan dengan si pengadu, persis seperti analogi Uni Soviet atau PKI, kalo di Indonesia. Tapi aku setuju cancel culture diterapkan untuk beberapa kasus dan untuk menghadapi orang-orang tertentu. Misalnya kasus pemerkosaan dan/atau dilakukan oleh orang-orang yang punya cukup kuasa–atau uang. Dulu setahuku, awal-awal munculnya fenomena 'spill the tea' di Twitter, banyaknya memang kasus pemerkosaan atau sexual harrasment. Itu pun biasanya karena saluran-saluran peradilan formal tidak bekerja. Atau para korban tak cukup berani untuk mengadu kepada siapa pun, kecuali kepada warganet di Twitter–ya, karena dia bisa tampil anonim. Bagi pelaku kasus ini, cancel culture terbilang enteng sebenarnya. Karena, ya, orang akan dengan mudah melupakan kasusnya, terlebih apabila orangnya punya kuasa yang bisa menarik orang-orang oportunis di sekitarnya. Dengan kata lain, dia bisa dengan mudah memperbaiki citranya di hadapan publik. Sama lah kayak kasus-kasus politisi yang bisa dengan mudah melenggang mencalonkan diri jadi pejabat lagi meski pernah dipenjara karena korupsi.

Aku jadi teringat kasus Marianne Bachmeier yang menembak mati pemerkosa anaknya. Padahal itu di Jerman, yang barangkali peradilannya jauh lebih baik dibanding Indonesia. Aku bisa membayangkan menjadi orangtua, di Indonesia, yang anaknya diperkosa atau dibunuh. Bisa dibayangkan betapa putus asanya menjadi si orangtua. Jika aku di posisi Marianne, mungkin aku akan melakukan hal yang sama. Rasanya akan lebih puas daripada sekadar menyeretnya ke pengadilan ataupun mempermalukannya di hadapan netizen.

★ Like

Reply

Leave a comment

← Previous Post Next Post →

Top